

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan berfokus pada hubungan keagenan. Teori keagenan adalah sebuah perjanjian dimana satu pihak (pemilik utama) mengontrak pihak lain (agen) untuk melakukan tugas tertentu, yang kemudian memberikan agen kewenangan dalam pengambilan keputusan (Karaye *et al.*, 2024). Manajer memiliki kewajiban kepada para pemegang saham, namun mereka juga memiliki kepentingan pribadi. Kepentingan bersama dari kedua pihak ini sering kali menghasilkan dilema yang dikenal sebagai masalah keagenan. Posisi manajer bisa terancam jika mereka tidak berhasil. Untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan diri mereka sendiri, manajer perlu memiliki keteguhan hati dalam mengendalikan laba (Maychandra & Nelvirita, 2023). Seringkali, konflik antara manajemen dan pemegang saham terjadi terutama terkait dengan proses pengambilan keputusan mengenai pencairan dana dan strategi investasi dana yang telah diperoleh. Penting bagi pemegang saham untuk memiliki kepercayaan terhadap manajer, sementara manajer perlu bersikap transparan dalam upaya mereka untuk mencapai kinerja yang baik (Fariha *et al.*, 2022).

Teori keagenan dalam konteks penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan integritas laporan keuangan sebagai salah satu

pertanggungjawaban dari agen kepada principal (Reschiwati & Aryanty, 2024). Selain itu, peran profesi akuntan publik untuk mengawasi pengelolaan entitas dan menilai kinerja manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Keterkaitan yang signifikan antara teori keagenan dan penelitian yang sedang dilakukan adalah untuk menyelidiki mutu audit yang dilakukan oleh auditor di Kantor Akuntan Publik Jakarta terhadap laporan keuangan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan agen seringkali menjadi fokus, dengan auditor sebagai pihak eksternal berperan sebagai mediator untuk mengatasi asimetri informasi dan konflik kepentingan yang mungkin timbul. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas laporan keuangan yang diaudit oleh auditor bermutu tinggi, bebas dari kesalahan materiil, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan investor.

2. Komisaris Independen

Menurut UU PT, komisaris independen merupakan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham utama, anggota dewan direksi dan/atau anggota komisaris lainnya. Orang yang dapat diangkat menjadi komisaris independen mampu untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit. Jika seorang komisaris dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Tugas dari seorang komisaris adalah mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan seperti nasihat kepada Direksi. Perusahaan dengan praktik tata kelola yang baik cenderung menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. Oleh karena itu, negara-negara terus memperbarui pedoman dan prosedur tata kelola mereka. Kehadiran komisaris independen, yang didorong oleh pemerintah dan regulator, memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan menjadi faktor utama dalam menarik investor domestik dan internasional (Al-ahdal & Hashim, 2022).

Dalam suatu perusahaan peran komisaris independen ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, dan untuk menjaga fairness yang dimana dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, serta kepentingan *stakeholder* lainnya. Menurut Ayem & Yuliana (2019) mengatakan bahwa suatu komisaris independen dapat mengutarakan pendapat yang berbeda dari dewan komisaris dan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan. Komisaris independen ini memiliki sikap yang netral di dalam perusahaan serta tidak memihak satu sama lain, yang dimana hal ini sangat berguna pada fungsi *monitoring* (Azzah, 2021).

3. Komite Audit

Komite audit (KA) dibentuk sebagai subkomite dari dewan direksi untuk menjaga kepentingan pemegang saham dengan mengawasi aspek

keuangan perusahaan (Ugbah *et al.*, 2023). Komite audit merupakan kunci penting dalam tata kelola perusahaan (Mardessi, 2021). Komite audit adalah sebuah organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris yang dapat bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu dan mendukung Dewan komisaris dalam menjalankan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan (Onyabe *et al.*, 2018). Komite audit ini cukup penting dari pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit perlu memastikan bahwa auditor eksternal bekerja secara efektif (Saputri & Sudrajat, 2023). Fungsi komite audit, yang meliputi peninjauan pelaporan keuangan dan pengawasan aktivitas eksekutif, terkait dengan keberhasilan dewan (Farooque, 2019).

Pengawasan yang diperankan oleh komite audit, seperti pengawasan terhadap pelaporan keuangan, pengawasan terhadap proses auditing, pengawasan terhadap manajemen risiko, dan pengawasan terhadap implementasi *corporate governance* (Bazhair, 2022). Komite audit mengevaluasi apakah manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal bekerja demi kepentingan terbaik perusahaan (Boshnak, 2021). Fungsi dan tanggung jawab komite audit dapat dipandu dan diatur oleh undang-undang atau prinsip tata kelola perusahaan (Henry *et al.*, 2022). Hal ini dianggap sebagai alat yang diperlukan untuk tata kelola perusahaan yang efektif dalam organisasi mana pun yang bertujuan untuk menyalurkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, dan juga

meningkatkan transparansi dalam organisasi (Agyemang, 2020). Dalam komite audit terdapat mengenai keanggotan yang berdasarkan peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, sebagai berikut:

- a. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Komite Audit diketahui oleh Komisaris Independen;

Tidak hanya dengan keanggotaan komite audit, namun terdapat juga persyaratan untuk dapat diangkat menjadi komite audit adalah:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal juga peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik;

- d. Tidak memiliki kepentingan/ketertarikan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan, antara lain:
- 1) Mempunyai kaitan keluarga saudara dan semenda sampai sederajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan;
 - 2) Mempunyai kaitan dengan rekanan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan;
- e. Mampu berkomunikasi secara efektif;

Di sisi lain, komite audit ini memiliki peran penting dalam praktik tata kelola perusahaan (Alhumoudi, 2024). Komite audit yang baik bisa mengurangi risiko pengendalian, tapi risiko inheren tetap ada dan tidak bisa sepenuhnya dihindari. Risiko ini muncul dari faktor-faktor seperti risiko bisnis dan kompleksitas perusahaan, serta lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Alkebsee *et al.*, 2020). Dengan adanya komite audit tersebut dapat mengemban tanggung jawab untuk menolong tugas dewan komisaris, yang dimana guna meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap laporan keuangan perusahaan (Bouaine & Hrichi, 2019). Oleh karena itu, pengawasan pada perusahaan harus dilakukan dengan ketat dalam pelaksanaan proses pelaporan keuangan perusahaan dengan adanya komite audit (Sharawi, 2022).

4. Integritas Laporan Keuangan

Menurut PSAK I mengenai laporan keuangan mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu laporan yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan pada entitas. Kinerja keuangan tersebut secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan dan nilai yang diberikannya kepada para pemegang saham (Bako, 2024). Perusahaan melakukan audit keuangan untuk memastikan integritas laporan keuangan, mematuhi peraturan, dan memberikan kepercayaan kepada investor serta pemangku kepentingan (Voinea *et al.*, 2024). Menurut Maychandra & Nelvirita (2023) hasil laporan keuangan adalah suatu informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada pihak eksternal mengenai kinerja dan aktivitas perusahaan dalam periode tertentu. Integritas laporan keuangan, sesuai dengan IFRS tergantung pada kepatuhan terhadap standar *faithfull representation*. Faktor kualitas seperti reliabilitas dan validitas dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan. Dalam laporan tersebut, semua transaksi usaha yang terjadi selama periode itu dipaparkan, termasuk perubahan nilai ekonomi bagi pemilik modal baik yang naik maupun turun. Integritas laporan keuangan sangat penting karena semakin tinggi integritas laporan keuangan suatu perusahaan, semakin menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan tersebut akurat, jujur, dan tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan (Hifnelda & Sasongko, 2021).

Dengan adanya laporan keuangan sangat penting dalam mengelola suatu perusahaan. Laporan keuangan tersebut dapat membantu manajemen dalam memantau kinerja keuangan secara terperinci, dan dapat untuk mengevaluasi pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan keuangan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, baik dari investasi, pinjaman, maupun keputusan operasional lainnya. Laporan keuangan ini menyampaikan informasi yang memberikan transparansi kepada pihak luar seperti investor, kreditur, dan regulator yang dapat membangun kepercayaan investor dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan konsep No.2 (SFAC No.2), integritas laporan keuangan merujuk pada kualitas informasi yang memastikan bahwa informasi tersebut disajikan secara wajar, tanpa kesalahan atau bias, serta dinyatakan secara jujur.

5. *Whistleblowing System*

Whistleblowing system merupakan sistem untuk melaporkan dugaan tindak pidana tertentu yang melibatkan pegawai dan pihak lain di dalam organisasi tempat mereka kerja, dengan syarat bahwa pelapor tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya (Vian *et al.*, 2022). *Whistleblowing system* ini dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peran aktif masyarakat yang ditindaklanjuti dengan peran aktif organisasi untuk menindaklanjuti setiap laporan masuk untuk meneliti kebenarannya, menerapkan proses sanksi, maupun perlindungan kerahasiaan bagi pelapor dan kesempatan pembelaan bagi pihak yang terlapor. *Whistleblowing* ini

dapat mengungkapkan perilaku yang melanggar hukum, tidak pantas, atau tindakan lain yang dapat merugikan organisasi (Wahyudi *et al.*, 2021).

Dalam lingkup *whistleblowing* adalah suatu tindakan kesalahan atau kegiatan ilegal dalam proses bisnis perusahaan yang berdampak pada lingkungan alam dan sosialnya. Meskipun praktik *whistleblowing* mulai diterapkan di berbagai perusahaan di Indonesia, belum ada penelitian yang menyelidiki dampak sistem *whistleblowing* terhadap integritas laporan keuangan perusahaan. Padahal, keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan aktivitasnya kepada pemangku kepentingan sangat berkaitan erat dengan integritas laporan keuangannya (Sofia, 2018). Pengaduan atau pengungkapan yang akan direspons oleh *whistleblowing system* mencakup tindakan atau pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi perseroan, yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Tindak korupsi;
- b. Tindak pencurian dan penggelapan;
- c. Tindak kecurangan atau perilaku yang tidak patut;
- d. Terjadinya benturan kepentingan;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (tindakan yang melanggar hukum);
- f. Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan; dan
- g. Pelanggaran terhadap prosedur operasi standar (SOP) perseroan.

B. Peneliti Terdahulu

Peneliti sebelumnya diartikan sebagai usaha peneliti dalam mencari perbandingan untuk menemukan ide-ide baru yang menginspirasi penelitian berikutnya. Pada bagian ini, peneliti mencatat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti yang tercantum dibawah ini:

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2023) (Maychandra & Nelvirita, 2023) | Variabel Independen: X1 = Kepemilikan Institusional X2 = Komisaris Independen X3 = Komite Audit X4 = Kepemilikan Manajerial Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan | Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. | Berdasarkan temuan penelitian ini, kepemilikan institusional, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan, namun independen komisaris mempunyai pengaruh yang baik dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan |
| 2 | Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Integritas | Variabel Independen: X1 = Komisaris Independen X2 = Komite Audit X3 = | Metode yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, | Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, komisaris independen, komite audit |

| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|---|---|---|--|
| | Laporan Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2020. (Sonia & Nazir, 2022) | Financial Distress Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan | uji hipotesis. | dan <i>financial distress</i> memiliki dampak terhadap integritas laporan keuangan. |
| 3 | Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kimia Periode 2018-2021) (Sembiring <i>et al.</i> , 2022) | Variabel Independen: X1 = Komite Audit X2 = Komisaris Independen X3 = Struktur Kepemilikan Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan | Metode yang digunakan adalah analisis data menggunakan program SPSS versi 26 yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. | Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan secara simultan komite audit, komisaris independen dan struktur kepemilikan berpengaruh |

| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|--|---|--|--|
| | | | | terhadap integritas laporan keuangan. |
| 4 | Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Integritas Laporan Keuangan. (Pratika & Primasari, 2020) | Variabel Independen: X1 = Komisaris Independen X2 = Komite Audit X3 = Ukuran Perusahaan X4 = Leverage X5 = Ukuran Kantor Akuntan Publik Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan | Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji kelayakan model. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. |
| 5 | Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan <i>Whistleblowing</i> System Sebagai Variabel Moderasi (Sofia, 2018) | Variabel Independen: X1 = Komite Audit Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan Variabel Moderasi: Z = <i>Whistleblowing System</i> | Analisis data menggunakan regresi linier berganda, dan untuk menentukan hipotesis digunakan uji-t dan uji-F. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas Laporan Keuangan. Kebijakan <i>Whistleblowing</i> mampu memoderasi hubungan antara komite |

| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|---|---|--|--|
| | | | | audit terhadap integritas Laporan Keuangan. |
| 6 | Pengaruh Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Di BEI (Fahmi & Nabila, 2020) | Variabel Independen: X1 = Kepemilikan Instiusional X2 = Kepemilikan Manajerial X3 = Komisaris Independen X4 = Komite Audit Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan | Alat uji yang digunakan adalah uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan instiusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. |

| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|---|--|---|--|
| | | | | Kemudian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap integritas laporan keuangan secara simultan. |
| 7 | Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 (Yudiawan <i>et al.</i> , 2022) | Variabel Independen: X1 = Komisaris Independen Audit X2 = Komite Kepemilikan Institusional X3 = Leverage X4 = Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan keuangan | Alat uji yang digunakan adalah uji analisis regresi linier berganda, uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, uji t. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan audit variabel komite tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas keuangan pernyataan. |

| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|---|---|---|--|
| 8 | The Effect of Independent Commissioners, Audit Committees, Financial Distress, And Company Sizes on Integrity of Financial Statements. (Permatasari <i>et al.</i> , 2019) | Variabel Independen: X1 = Independent Commissioners X2 = Audit Committees X3 = Financial Distress X4 = Company Sizes Variabel Dependen: Y = Financial Statements | This study uses secondary data in the form of annual financial statements of financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2012 to 2018. | From theoretical discussions and previous research, conclusions are obtained while independent commissioners, audit committees, financial distress, and company size on the integrity of financial statements have a positive effect. |
| 9 | Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan: <i>Whistleblowing System</i> Sebagai Variabel Pemoderasi (Oktasia Masnar <i>et al.</i> , 2023) | Variabel Dependen: X1 = Komisariss Independen X2 = Komite Audit X3 = Internal Audit Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan Z = <i>Whistleblowing System</i> | Alat uji yang digunakan adalah <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> . | Hasil penelitian memperlihatkan bahwa komisariss independen tidak mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan, namun komite audit dan internal audit secara parsial mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya <i>whistleblowing</i> |

| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|---|--|---|---|
| | | | | system tidak dapat memoderasi pengaruh antara komisaris independen dan internal audit terhadap integritas laporan keuangan, namun <i>whistleblowing</i> system dapat memoderasi komite audit terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam peningkatan integritas laporan keuangan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada pelaporan keuangan. |
| 10 | Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> , Komite Audit, Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan | Variabel Independen: X1 = <i>Intellectual Capital</i> X2 = Komite Audit X3 = Komisaris | Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik perusahaan dan pengujian hipotesis | Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan Modal intelektual, Komite audit dan independensi |

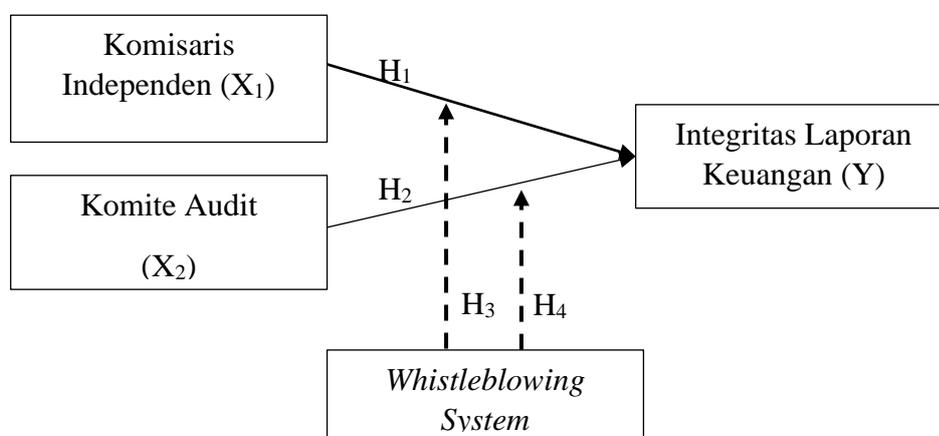
| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|--|--|--|---|
| | Keuangan (Herlambang & Nurbaiti, 2023) | Independen Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan | menggunakan model regresi untuk panel informasi digunakan. | dewan komisaris mempunyai efek secara bersamaan. Sementara itu, hasil pemeriksaan sebagian panitia dan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap integritas keuangan laporan, sedangkan modal intelektual berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. |
| 11 | The Effect of Independent Commissioners, Audit Commite, Audit Quality, and Leverage on Financial Statement Integrity with Firm Size as a Moderating Variable in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange | Variabel Independen: X1 = Komisaris Independen X2 = Komite Audit X3 = Leverage Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan | Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan uji regresi berganda dan uji interaksi moderasi dengan bantuan Eviews. | Hasil penelitian ini menunjukkan secara alpha lima persen (0,5%), komite audit, kualitas audit, dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sebaliknya, |

| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|--|---|--|--|
| | (Putra <i>et al.</i> , 2022) | Variabel Moderasi: Z = Firm Size | | komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Namun ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh komisaris independen dan leverage integritas laporan keuangan. |
| 12 | The Role of Audit Quality in Moderating Audit Tenure, Audit Fees, Auditor's Reputation and Audit Committees on | Variabel Independen: X1 = Audit Tenure X2 = Audit Fees X3 = Reputasi Auditor | Analisis penelitian menggunakan regresi logistik dengan moderating analisis regresi. | Temuan mengungkapkan bahwa Audit Tenure dan Biaya Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap |

| No | Judul dan Nama Penulis | Variabel | Alat Uji | Hasil |
|----|--|---|----------|--|
| | the Integrity of Financial Statements (Wahyudi Sabaruddin, 2023) | <p>X4 = Komite Audit</p> <p>Variabel Dependen: Y = Integritas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Moderasi: Z = Kualitas Audit</p> | | <p>laporan keuangan integritas. Namun, Reputasi dan Auditor Komite mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Selain itu, Kualitas Audit memoderasi hubungan antara Reputasi Auditor dan integritas laporan keuangan, serta dampaknya Komite Audit mengenai integritas laporan keuangan. Ini hasil berkontribusi pada Teori Agensi. Hasil dari ini penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi terhadap Teori Agensi.</p> |

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep yang diukur atau diamati dalam sebuah penelitian. Kerangka ini harus mampu memperlihatkan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:



: Hubungan Parsial



: Hubungan Moderasi

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Sedangkan, menurut (Riduwan, 2018) hipotesis adalah tanggapan awal terhadap perumusan masalah penelitian, di mana permasalahan telah diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Karakteristik sementara terletak pada

ketergantungan pada teori yang relevan tanpa dukungan dari fakta empiris yang terkumpul.

Dalam konteks penerapan kerangka pemikiran dan dukungan dari teori yang tersedia, hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Direksi memantau dan mengelola kebijakan serta pelaksanaannya secara menyeluruh, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33//POJK.04/2014 mengenai direksi. Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam mengambil keputusan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kecurangan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam kecurangan memiliki proporsi anggota dewan komisaris eksternal yang jauh lebih rendah secara signifikan daripada perusahaan yang tidak terlibat dalam kecurangan (Sonia & Nazir, 2022). Menurut Anggraeni *et al.* (2020), Sucitra *et al.* (2020) dan Fitriyaningsih *et al.* (2023) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Suroya *et al.* (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kinerja perusahaan secara keseluruhan mampu ditingkatkan

dengan efektivitas pengawasan dari komisaris independen. Peningkatan pengawasan ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan dapat diandalkan, hal ini memperkuat integritas praktik pelaporan keuangan suatu perusahaan, melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan meningkatkan keandalan informasi perusahaan yang diungkapkan. Komisaris independen mempunyai peran sebagai penengah jika muncul perseteruan di antara manajer internal dan memonitoring kebijakan manajer dan juga memberi nasihat kepada manajemen (Manuari & Devi, 2021). Jika perusahaan memiliki komisaris independen, laporan keuangan yang disusun manajemen cenderung lebih berintegritas. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sucitra *et al.* (2020) komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Adanya komisaris independen dalam perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan kinerja manajemen perusahaan karena komisaris independen lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan komisaris independen juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan karena pengawasan komisaris independen ini akan berdampak baik pada *stakeholder* (Sucitra *et al.*, 2020). Hal ini tentunya berdampak pada pengungkapan informasi perusahaan lebih andal dan tidak memihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Integritas Laporan Keuangan

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan keuangan

Menurut peraturan OJK nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite audit adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Peran komite audit sangat penting karena merupakan cara untuk memastikan keandalan laporan keuangan (Shakya, 2020). Adanya komite audit dapat membantu untuk memastikan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Salah satu tujuan utama pembentukan komite audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak menyesatkan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, komite audit juga bertugas untuk menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukum yang terkait (Fahmi & Nabila, 2020). Menurut Evelyn (2020), Ardani & Aryati (2023), dan Oktaviana & Paramitha (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

Komite audit bagian internal yang menguasai kemampuan untuk mengevaluasi keberhasilan prosedur pelaporan dan implementasi perusahaan. Tujuan dari pembentukan komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris menjaga mereka di bawah pengawasan

(Maychandra & Nelvirita, 2023). Komite ini juga bertanggung jawab atas sistem kontrol manajemen dan menentukan seberapa baik laporan keuangan akan dibuat dan memastikan bahwa informasi yang diungkapkan akurat (Rajashekar, 2022). Komite audit, sebagai komponen utama tata kelola perusahaan, memainkan peran penting dalam mengawasi pelaporan keuangan dan memberikan jaminan atas keandalan laporan keuangan (Bii & Kinuthia, 2024). Laporan keuangan terakhir serta keuntungan yang diperoleh perusahaan dari RUPS dapat disampaikan oleh komite audit. Selain itu, komite audit juga harus memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijakan tersebut, apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Christiana *et al.*, 2021). Kurniawan & Fahrunniza (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan jumlah komite audit mempengaruhi integritas laporan keuangan. Jumlah komite audit yang banyak dipercaya mampu dalam melakukan pengawasan secara maksimal terhadap proses pembuatan laporan keuangan. Dengan begitu, adanya komite audit dipercaya dapat membuat perusahaan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Integritas Laporan Keuangan

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan Moderasi *Whistleblowing System*

Whistleblowing system berperan penting dalam memoderasi peran Komisaris Independen terhadap integritas laporan keuangan (Masnar *et al.*, 2023). Adanya dewan komisaris ini dapat memastikan transparansi dan keinformatifan laporan keuangan, yang pada gilirannya memudahkan pemegang saham untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Dewan komisaris ini bertugas untuk mengawasi tindakan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Komisaris Independen, yang tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak dalam perusahaan, dapat memainkan peran kritis dalam evaluasi masalah dengan objektivitas, tanpa memihak pada kepentingan pribadi atau pihak tertentu (Fahmi & Nabila, 2020). Menurut Novianti & Isyuardhana (2021), dan Sonia & Nazir (2022) menyatakan komisaris independen ini berpengaruh terhadap integritas laporan akhir. Hasil penelitian Masnar *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* mampu memperkuat hubungan antara komisaris independen dan integritas laporan keuangan.

Sistem *whistleblowing* mendorong terbuka dan transparan dalam organisasi. Komisaris independen yang memiliki kepedulian terhadap integritas laporan keuangan dapat menggunakan sistem ini sebagai saluran untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait potensi pelanggaran

atau ketidakberesan dalam pelaporan keuangan. Penerapan *whistleblowing system* bertujuan untuk meminimalisir terjadinya *fraud* pada perusahaan (Wahyuningtiyas & Pramudyastuti, 2022). *Fraud* digolongkan menjadi tiga, diantaranya ialah korupsi, kecurangan pada laporan keuangan dan penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan (ACFE Indonesia, 2020). *Whistleblowing system* yang efektif memberikan perlindungan kepada para pelapor yang memberikan informasi tentang pelanggaran atau kecurangan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2008, membuat sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagai alat penunjang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya dewan komisaris (Safitri & Rani, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : *Whistleblowing System* Memperkuat Hubungan Antara Komisaris Independen dan Integritas Laporan Keuangan

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan Moderasi *Whistleblowing System*

Skandal-skandal kecurangan yang masih sering terjadi dalam dunia bisnis telah membangkitkan kesadaran di berbagai negara dan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah dan mengurangi praktik kecurangan. Peran komite audit adalah memantau dan mengawasi audit laporan keuangan untuk memastikan bahwa standar dan kebijakan keuangan yang berlaku telah terpenuhi (Abbas *et al.*, 2021). Kebijakan tata

kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KKNG) pada tahun 2008, dengan memasukkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagai bagian yang mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal (Fitrianingsih *et al.*, 2023). Semakin independen komite audit, semakin efektif dalam mencegah praktik manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya memiliki tingkat integritas yang tinggi (Anggraeni *et al.*, 2020). Menurut Febrina & Rabaina (2019) komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan akhir. Hasil penelitian Masnar *et al.* (2023) menyatakan bahwa *whistleblowing system* dapat memperkuat antara komite audit dan integritas laporan keuangan.

Whistleblowing merupakan bagian dari *good corporate governance* yang digunakan untuk menyampaikan adanya penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam suatu organisasi, termasuk penyimpangan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Demikian pula dengan komite audit yang juga merupakan bagian dari *good corporate governance* yang berfungsi dalam pengawasan termasuk dalam penyusunan laporan keuangan (Sofia, 2018). Sehingga dengan adanya kebijakan *whistleblowing* yang ada dalam suatu perusahaan, tentunya akan

membantu atau mendukung fungsi pengawasan dari komite audit. Komite audit memiliki tugas untuk menentukan bahwasanya tidak terdapat kecurangan dan penyimpangan dalam laporan keuangan yang dapat merugikan para pengguna laporan keuangan dan tugas komite audit ini dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pelaksanaan *whistleblowing system* yang baik (Masnar *et al.*, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : *Whistleblowing System* Memperkuat Hubungan Antara Komite Audit dan Integritas Laporan Keuangan